



**PEMERINTAH
KABUPATEN SUKABUMI**

RENCANA KERJA TAHUN

2025



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 20 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909)
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 114);
25. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.

5. Sekretaris

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya, baik yang

berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, strategi dan prioritas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, perkiraan capaian tahun berjalan, tujuan dan sasaran program / kegiatan, serta kelompok sasaran dan penganggarnya.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai tujuan:
 - a. sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2025; dan
 - b. sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV SISTIMATIKA

Pasal 4

- I. PENDAHULUAN
- II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- V. PENUTUP

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah per Triwulan setiap tahunnya kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal, 05 Agustus 2024

BUPATI SUKABUMI



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 05 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 20 TAHUN 2024

TANGGAL : 05 AGUSTUS 2024

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025**

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025;
3. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025;
4. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025;
5. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025;
6. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025;
7. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025;
8. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025;
9. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025;
10. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025;
11. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025;
12. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2025;
13. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025;
14. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
15. Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;
16. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2025;
17. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025;
18. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2025;
19. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2025;
20. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025;
21. Rencana Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Tahun 2025;
22. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2025;
23. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2025;
24. Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025;
25. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025;
26. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025;
27. Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025;
28. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025;

29. Rencana Kerja Dinas Peternakan Tahun 2025;
30. Rencana Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Tahun 2025;
31. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2025;
32. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Tahun 2025;
33. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025;
34. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025;
35. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025;
36. Rencana Kerja Kecamatan Sukabumi Tahun 2025;
37. Rencana Kerja Kecamatan Jampangtengah Tahun 2025;
38. Rencana Kerja Kecamatan Sukaraja Tahun 2025;
39. Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2025;
40. Rencana Kerja Kecamatan Cisaat Tahun 2025;
41. Rencana Kerja Kecamatan Nagrak Tahun 2025;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kadudampit Tahun 2025;
43. Rencana Kerja Kecamatan Sukalarang Tahun 2025;
44. Rencana Kerja Kecamatan Gunungguruh Tahun 2025;
45. Rencana Kerja Kecamatan Kabandungan Tahun 2025;
46. Rencana Kerja Kecamatan Surade Tahun 2025;
47. Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2025;
48. Rencana Kerja Kecamatan Ciracap Tahun 2025;
49. Rencana Kerja Kecamatan Kebonpedes Tahun 2025;
50. Rencana Kerja Kecamatan Kalibunder Tahun 2025;
51. Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2025;
52. Rencana Kerja Kecamatan Purabaya Tahun 2025;
53. Rencana Kerja Kecamatan Cireunghas Tahun 2025;
54. Rencana Kerja Kecamatan Cibitung Tahun 2025;
55. Rencana Kerja Kecamatan Gegerbitung Tahun 2025;
56. Rencana Kerja Kecamatan Cidahu Tahun 2025;
57. Rencana Kerja Kecamatan Cicurug Tahun 2025;
58. Rencana Kerja Kecamatan Sagaranten Tahun 2025;
59. Rencana Kerja Kecamatan Nyalindung Tahun 2025;
60. Rencana Kerja Kecamatan Curugkembar Tahun 2025;
61. Rencana Kerja Kecamatan Tegalbuled Tahun 2025;
62. Rencana Kerja Kecamatan Cidadap Tahun 2025;
63. Rencana Kerja Kecamatan Cidolog Tahun 2025;
64. Rencana Kerja Kecamatan Ciambar Tahun 2025;
65. Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Tahun 2025;
66. Rencana Kerja Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2025;
67. Rencana Kerja Kecamatan Cikakak Tahun 2025;
68. Rencana Kerja Kecamatan Simpenan Tahun 2025;
69. Rencana Kerja Kecamatan Cisolok Tahun 2025;
70. Rencana Kerja Kecamatan Bantargadung Tahun 2025;
71. Rencana Kerja Kecamatan Warungkiara Tahun 2025;
72. Rencana Kerja Kecamatan Cikidang Tahun 2025;
73. Rencana Kerja Kecamatan Cikembar Tahun 2025;
74. Rencana Kerja Kecamatan Kalapanunggal Tahun 2025;

75. Rencana Kerja Kecamatan Lengkong Tahun 2025;
76. Rencana Kerja Kecamatan Ciemas Tahun 2025;
77. Rencana Kerja Kecamatan Cibadak Tahun 2025;
78. Rencana Kerja Kecamatan Cicantayan Tahun 2025;
79. Rencana Kerja Kecamatan Waluran Tahun 2025;
80. Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2025;
81. Rencana Kerja Kecamatan Parakansalak Tahun 2025;
82. Rencana Kerja Kecamatan Jampangkulon Tahun 2025.

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "BUPATI SUKABUMI" are written in a semi-circle at the top, and "SUKABUMI" is written at the bottom. In the center, there is a Garuda emblem. A blue ink signature is written across the seal.
BUPATI SUKABUMI,
MARWAN HAMAMI



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 000.7.2.6 /Kp.275-BAPPE LITBANGDA /2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2025
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun dokumen yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mengarahkan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7, Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 92);
25. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

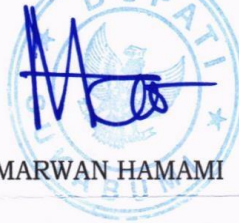
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024;
- b. menelaah dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2025;
- c. menelaah Renja Kementerian PPN/Bappenas maupun Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat;
- d. menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun lalu;
- e. merumuskan tujuan, sasaran, rencana kerja dan pendanaan sebagaimana Rencana Startegis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- f. menyusun dan menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

- KETIGA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal : 20 Maret 2024

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 000.7.2.6/kep.275-BAPPELITBANGDA/2024
TANGGAL : 20 Maret 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2025
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ;
 2. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 4. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 7. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 8. Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi;
 9. Unsur Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi.

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI



KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana PD wajib menyusun Rencana Kerja yang merupakan turunan dari Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) harus disusun dan ditetapkan sebagai suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun belum optimal. Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Melalui dokumen ini, Bappeda Kabupaten Sukabumi mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berazaskan keadilan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi, daya saing dan pelayanan publik.

Palabuhanratu, Juli 2024
Kepala,



H. Aep Majmudin, SE., MM.

Pembina Tk. I, IV/a

NIP. 19740805 200312 1 003



DAFTAR ISI

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor : 20 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025

Keputusan Bupati Nomor : 000.7.2.6/Kep.275-Bappelitbangda/2024 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab. I Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
Bab. II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun	
Lalu.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappelitbangda 2021-2026.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda	II-23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda	II-29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	II-45
Bab. III Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda.....	III-7
3.3 Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2025.....	III-9
Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan	IV- 1
Bab. V Penutup	V-1
Lampiran-lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan / Sub Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan – Bappelitbangda Tahun 2023	II - 4
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023	II - 13
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	II - 26
Tabel 2.4	Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah	II - 26
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026	II - 27
Tabel 2.6	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda	II - 28
Tabel 2.7	Review Rencana Kerja Terhadap Rancangan Awal RKPD	II - 33
Tabel 2.8	Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Sukabumi	II - 46
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda	III - 9
Table 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab Sukabumi Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	IV - 3



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Sukabumi tahun 2025 III - 6



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras



dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan yang di atasnya seperti RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk menyusun Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Bappelitbangda Tahun 2024 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Bappelitbangda Kabupaten



Sukabumi Tahun 2021-2026. Dalam prosesnya penyusunan Renja Bappelitbangda Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023. Oleh karena itu penyusunan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Selanjutnya Kepala Bappelitbangda menetapkan Renja Bappelitbangda untuk menjadi pedoman di lingkungan Bappelitbangda dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja



- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Permutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);



20. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 92);
21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor : 20 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;
23. Keputusan Bupati Nomor : 000.7.2.6/Kep.275-Bappelitbangda / 2024 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 Dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Bappelitbangda Tahun 2025 adalah untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat target kinerja, realisasi dan proyeksi.

Tujuan disusunnya Renja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 adalah:

- a. Mewujudkan konsistensi perencanaan tahunan teknis Bappelitbangda dengan arahan strategis Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi;
- b. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2025;
- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
- d. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;



- e. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Bappelitbangda maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2024 dan Capaian Renstra Bappelitbangda 2021-2026
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda
- 3.3. Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP



BAB II.

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappelitbangda 2021-2026

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi



kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Bappelitbangda. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Pada tahun 2023 Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi melaksanakan 4 (empat) program, 18 (delapanbelas) kegiatan dan 71 (tujuhpuluh satu) sub kegiatan. Dengan total alokasi anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 15,565,111,443,- (lima belas milyar lima ratus enam puluh lima juta Seratus sebelas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dengan realisasi Rp. 15,165,664,102,- (lima belas milyar serratus enampuluh lima juta enam ratus enamored puluh empat ribu serratus dua rupiah) atau 97,43%. Dibagi kedalam 4 (empat) program yaitu;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Sebanyak 8 Kegiatan, 31 Sub Kegiatan, Total Anggaran Rp. 11,170,324,543,- terserap sebesar Rp. 10,965,301,408,- persentase serapan sebesar 98,16%.



2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Sebanyak 3 Kegiatan, 11 Sub Kegiatan, Total Anggaran Rp. 1,306,769,000,- terserap sebesar Rp. 1,243,905,558,- dengan persentase serapan sebesar 95.19%.
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Sebanyak 3 Kegiatan, 24 Sub Kegiatan Total Anggaran Rp. 2,343,017,900,- terserap sebesar Rp. 2,223,936,948,- dengan persentase serapan sebesar 94.92%.
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Sebanyak 4 Kegiatan, 5 Sub Kegiatan Total Anggaran Rp. 745,000,000,- terserap sebesar Rp. 732,520,188,- dengan persentase serapan sebesar 98.32%.

Capaian pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan – bappelitbangda dapat dilihat pada tabel 2.1 dan pada Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 sebagai berikut:



TABEL 2.1
Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan / Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan – Bappelitbangda Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	(%) Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%) Capaian Anggaran			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13			
5.1	Urusan Perencanaan	BAPPELITBANGDA	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 11 Noreg 7/209/2023 , tanggal 30 Oktober 2023 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Berita Dearah Tahun 2022 Nmor 40 , tanggal 30 Oktober 2023	PERENCANAAN & PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							15,565,111,443	15,165,664,102	97.43	
				PERENCANAAN								14,820,111,443	14,433,143,914	97.39
				01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								11,170,324,543	10,965,301,408	98.16
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100	100	100.00	126,780,900	118,359,800	93.36			
					Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100	100	100.00	7,663,441,783	7,554,562,977	98.58			
					Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100	100	100.00	34,580,000	31,768,000	91.87			
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	100	100.00	195,589,200	184,239,500	94.20			
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100	100	100.00	991,411,958	979,977,545	98.85			
					Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100	100	100.00	178,933,200	174,019,000	97.25			
					Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100	100	100.00	803,717,502	781,693,808	97.26			
					Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100	100	100.00	1,175,870,000	1,140,680,778	97.01			
					2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dacerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	41	41	100.00	126,780,900	118,359,800	93.36		
					1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	100.00	80,095,200	71,771,400	89.61		



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	(%) Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%) Capaian Anggaran	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	1	100.00	5,410,800	5,382,800	99.48
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	1	100.00	5,410,800	5,385,600	99.53
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	1	100.00	5,542,800	5,517,000	99.53
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	3	3	100.00	5,542,800	5,542,000	99.99
				7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	20	100.00	24,778,500	24,761,000	99.93
				2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66	66	100.00	7,663,441,783	7,554,562,977	98.58
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100.00	7,556,853,383	7,448,039,877	98.56
				3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31	31	100.00	25,639,200	25,639,000	100.00
				4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	100.00	16,675,200	16,675,200	100.00
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100.00	15,815,000	15,815,000	100.00
				7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	100.00	42,164,000	42,098,900	99.85
				8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100.00	6,295,000	6,295,000	100.00
				2	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	1	100.00	34,580,000	31,768,000	91.87



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	(%) Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%) Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
				6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100.00	34,580,000	31,768,000	91.87
				2.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10	10	100.00	195,589,200	184,239,500	94.20
				1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	2	100.00	13,671,000	13,666,500	99.97
				3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	3	100.00	159,918,200	150,573,000	94.16
				9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	100.00	22,000,000	20,000,000	90.91
				2.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	145	145	100.00	991,411,958	979,977,545	98.85
				3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	5	100.00	6,363,000	6,363,000	100.00
				4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	100.00	318,333,760	314,979,970	98.95
				5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50	50	100.00	124,675,198	123,520,750	99.07
				6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	50	100.00	89,000,000	84,100,000	94.49
				8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	24	100.00	168,600,000	168,517,500	99.95
				9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100.00	203,634,000	202,336,325	99.36
				10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100.00	80,806,000	80,160,000	99.20
				11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	-	-	-	-
				2.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	21	21	100.00	178,933,200	174,019,000	97.25
				6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21	21	100.00	178,933,200	174,019,000	97.25



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	(%) Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%) Capaian Anggaran	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
				0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	15	15	100.00	803,717,502	781,693,808	97.26
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100.00	164,520,000	156,907,351	95.37
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	100.00	639,197,502	624,786,457	97.75
				2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	78	78	100.00	1,175,870,000	1,140,680,778	97.01
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	13	100.00	757,850,000	725,046,503	95.67
				6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	64	100.00	91,750,000	91,718,999	99.97
				9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi	1	1	100.00	326,270,000	323,915,276	99.28
				02. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100.00	1,306,769,000	1,243,905,558	95.19
				0	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pemerintah Daerah	7	7	100.00	1,061,208,100	1,012,656,658	95.42
				1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD dan RKPD	1	1	100.00	159,411,300	159,321,300	99.94
				2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1	1	100.00	128,267,900	113,279,958	88.32
				3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	1	100.00	70,081,000	65,591,000	93.59
				4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	0	0	-	-	-	-
				5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	1	1	100.00	298,139,900	288,119,400	96.64
				6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1000	1000	100.00	227,422,000	217,539,000	95.65
				7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD)	2	2	100.00	177,886,000	168,806,000	94.90



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	(%) Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%) Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
				2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	100.00	176,417,000	165,595,500	93.87
				1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	1	100.00	49,454,000	47,775,000	96.60
				2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100	100	100.00	72,903,000	64,323,000	88.23
				3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	1	100.00	54,060,000	53,497,500	98.96
				0 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2	100.00	69,143,900	65,653,400	94.95
				1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1	1	100.00	14,759,900	14,661,900	99.34
				3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	1	100.00	54,384,000	50,991,500	93.76
				03.Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					2,343,017,900	2,223,936,948	94.92
					Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	25.52	25.53	100.04	788,977,100	750,745,058	95.15
					Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	26.33	26.36	100.11	785,774,600	754,543,433	96.03
					Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	26.6	26.7	100.38	768,266,200	718,648,457	93.54



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	(%) Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%) Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
				1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90	90	100.00	788,977,100	750,745,058	95.15
				1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14	14	100.00	199,436,800	190,753,000	95.65
				2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	13	13	100.00	1,974,800	1,973,000	99.91
				3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13	13	100.00	54,635,900	54,126,000	99.07
				4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	13	13	100.00	62,920,500	60,165,000	95.62
				5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	10	100.00	213,051,500	207,577,000	97.43
				6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9	9	-	-	-	-
				7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9	9	100.00	51,616,800	51,221,058	99.23
				8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9	9	100.00	205,340,800	184,930,000	90.06
				2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	33	33	100.00	785,774,600	754,543,433	96.03
				1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	5	100.00	19,284,200	19,224,200	99.69



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	(%) Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%) Capaian Anggaran	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
				2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	4	100.00	44,000,000	43,762,500	99.46
				3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	4	100.00	92,815,000	88,895,000	95.78
				4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	4	100.00	166,402,000	152,648,333	91.73
				5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	4	100.00	206,486,400	203,086,400	98.35
				6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	4	100.00	30,000,000	29,820,000	99.40
				7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	4	100.00	50,000,000	49,735,000	99.47
				8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4	4	100.00	176,787,000	167,372,000	94.67
				3	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	208	208	100.00	768,266,200	718,648,457	93.54
				1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	100.00	65,100,000	55,122,500	84.67
				2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	3	100.00	15,000,000	14,845,000	98.97



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	(%) Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%) Capaian Anggaran	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
				3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	3	100.00	50,127,000	49,692,000	99.13
				4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	3	100.00	216,889,400	204,318,640	94.20
				5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49	49	100.00	206,500,000	187,865,000	90.98
				6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	49	49	100.00	15,000,000	14,910,000	99.40
				7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	49	49	100.00	127,165,000	126,485,517	99.47
				8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	49	49	100.00	72,484,800	65,409,800	90.24
5.1	Urusan Penelitian dan Pengembangan	BAPPELITBANGDA		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						745,000,000	732,520,188	98.32
				02.Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/diimplementasikan	62.50	100	160.00	745,000,000	732,520,188	98.32
				1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	1	100.00	136,833,500	135,735,091	99.20
				12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	1	100.00	136,833,500	135,735,091	99.20
				2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1	1	100.00	50,000,000	49,550,000	99.10
				5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	1	100.00	50,000,000	49,550,000	99.10



No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	(%) Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%) Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
				3 <i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2	2	100.00	174,459,000	171,043,297	98.04
				4 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	1	100.00	114,459,000	111,602,797	97.50
				7 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	1	100.00	60,000,000	59,440,500	99.07
				4 <i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2	2	100.00	383,707,500	376,191,800	98.04
				1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	100.00	170,396,000	169,703,000	99.59
				4 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	1	100.00	213,311,500	206,488,800	96.80



Tabel 2.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2023

Indikator dan target kinerja PD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RPJMD

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Laporan Perangkat Daerah	100%	11,170,324,543		1,335,044,687		4,062,307,390		2,424,372,626		3,143,576,705		10,965,301,408		31,521,733,834	14=13/6*100%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	126,780,900	22.86%	25,024,000	14.29%	7,715,300	14.29%	27,211,900	48.57%	58,408,600	100.00%	118,359,800	100.00%	533,689,150	100.00%	53.37
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	80,095,200	2	15,343,000	2	3,989,300	2	20,832,000	3	31,607,100	9	71,771,400	25	249,521,100	55.56	71.29
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	5,410,800	-	-	-	-	-	-	1	5,382,800	1	5,382,800	3	19,811,600	60.00	19.81
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5,410,800	-	-	-	-	-	-	1	5,385,600	1	5,385,600	3	19,814,400	60.00	19.81
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	5,542,800	-	-	-	-	-	-	1	5,517,000	1	5,517,000	3	20,297,800	60.00	20.30
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	5,542,800	-	-	-	-	-	-	3	5,542,000	3	5,542,000	5	20,322,800	100.00	20.32
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	24,778,500	6	9,681,000	3	3,726,000	3	6,379,900	8	4,974,100	20	24,761,000	61	90,836,750	76.25	36.33
			Rata-Rata Capaian Kinerja			22.86%	19.74%	14.29%	6.09%	14.29%	21.46%	48.57%	46.07%	100.00%	93.36%	1.00%			
			Predikat Kinerja			Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai	100%	7,663,441,783	22.93%	643,780,314	63.45%	3,178,191,001	82.24%	1,638,384,316	92.93%	2,094,207,346	100.00%	7,554,562,977	100.00%	22,206,106,979	100.00%	48.35



No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%	
			peraturan Perundang-undangan																
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	528	7,556,853,383	126	630,552,314	341	3,159,465,001	470	1,608,157,816	528	2,051,434,746	528	7,449,609,877	1732	21,909,625,479	65.61	48.91
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31	25,639,200	3	4,272,800	18	2,322,800	3	6,409,200	7	12,634,200	31	25,639,000	93	71,990,200	60.00	28.80
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	16,675,200	0	3,980,200	0	1,640,200	-	5,385,300	1	5,669,500	1	16,675,200	3	61,322,400	60.00	24.53
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	15,815,000	0	-	0	3,250,000	-	-	1	12,565,000	1	15,815,000	3	51,320,000	60.00	17.11
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	42,164,000	4	4,975,000	9	11,513,000	3	12,137,000	2	11,903,900	18	40,528,900	54	88,768,900	60.00	35.51
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	6,295,000	-	-	0	-	1	6,295,000	-	-	1	6,295,000	3	23,080,000	60.00	30.77
			<i>Rata-Rata Capaian Kinerja</i>			22.93%	8.40%	63.45%	41.47%	82%	21.38%	92.93%	27.33%	100.00%	98.58%				
			<i>Predikat Kinerja</i>			Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100	34,580,000	0.00%	3,334,000	-	13,849,000		13,465,000	100.00%	1,120,000	100%	31,768,000	100%	198,380,750	100.00%	165.32
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	34,580,000	-	3,334,000	-	13,849,000	-	13,465,000	1	1,120,000	1	31,768,000	3	198,380,750	150.00	165.32
			<i>Rata-Rata Capaian Kinerja</i>			0.00%	9.64%	0.00%	40.05%	0.00%	38.94%	100.00%	3.24%	100.00%	91.87%				
			<i>Predikat Kinerja</i>			Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	195,589,200	0.00%	12,347,000	20.00%	67,251,000	20.00%	30,248,500.00	60.00%	74,393,000	100.00%	184,239,500	100.00%	546,940,500	100.00%	168.29
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	13,671,000	0	5,277,000	1	3,256,000	0	3,963,500	1	1,170,000	2	8,533,000	4	28,221,000	40.00	37.63
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	159,918,200	0	7,070,000	1	63,995,000	1	16,285,000	1	63,223,000	3	71,065,000	9	290,378,000	60.00	193.59



No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1		3	4	5	22,000,000	-	-	-	-	1	10,000,000	4	10,000,000	5	-	21	123,700,000	84.00	123.70
Rata-Rata Capaian Kinerja						0.00%	6.31%	20.00%	34.38%	0.20%	15.47%	60.00%	38.04%	100.00%	94.20%				
Predikat Kinerja						Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100	991,411,958	20.31%	296,607,808	15.63%	99,519,623	18.75%	219,867,898	43.75%	363,982,216	98.44%	979,977,545	98.44%	3,221,705,041	98.44%	34.83
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	8	23,512,700	40.00	47.03
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	6,363,000	2	3,922,300	0	-	2	2,440,700	3	-	7	6,363,000	28	25,863,500	80.00	51.73
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	318,333,760	1	138,334,970	1	17,055,500	1	68,704,250	2	90,885,250	5	314,979,970	15	1,463,523,430	60.00	146.35
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	124,675,198	1	58,137,150	0	5,686,800	0	14,049,000	1	45,647,800	2	123,520,750	6	359,677,250	60.00	71.94
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	89,000,000	3	16,950,000	3	7,700,000	3	26,900,000	3	32,550,000	12	84,100,000	36	228,700,000	14.40	57.18
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	168,600,000	3	28,000,000	3	33,625,000	3	68,022,500	15	38,870,000	24	168,517,500	72	437,002,500	60.00	43.70
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	203,634,000	3	45,540,388	3	31,473,323	3	39,751,448	3	85,571,166	12	202,336,325	36	511,286,061	60.00	8.52
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	80,806,000	0	5,723,000		3,979,000		-	1	70,458,000	1	80,160,000	3	125,238,000	60.00	83.49
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	-		-		-		-	0	-		-	2	46,901,600	40.00	46.90
Rata-Rata Capaian Kinerja						20.31%	29.92%	15.63%	10.04%	18.75%	22.18%	43.75%	36.71%	98.44%	99.95%				
Predikat Kinerja						Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100	178,933,200	0.00%	-	61.90%	92,539,000	-	-	38.10%	81,480,000	100.00%	174,019,000	100.00%	567,210,000	100.00%	56.72
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21	178,933,200			13	92,539,000			8	81,480,000	21	92,539,000	61	485,730,000	60.40	48.57
Rata-Rata Capaian Kinerja						0.00%	0.00%	61.90%	51.72%	12.50%	0.00%	25.00%	45.54%	100.00%	97.25%				



Rencana Kerja Bappeditbangda Tahun 2025

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
						Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah						
1				7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%	
				Predikat Kinerja		Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100	803,717,502	6.67%	179,864,267	46.67%	223,650,918	27%	238,199,550	20%	139,979,073	100.00%	781,693,808	100.00%	1,464,751,091	100.00%	73.24
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	164,520,000	1	35,615,787	6	37,269,858	3	44,128,273	2	39,893,333	12	156,907,251	24	333,599,034	40.00	133.44
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	639,197,502	0	144,248,480	1	186,381,060	1	194,071,277	1	100,085,740	3	624,786,557	6	1,131,152,057	40.00	64.64
			Rata-Rata Capaian Kinerja			6.67%	22.38%	46.67%	27.83%	26.67%	29.64%	20.00%	17.42%	100.00%	97.26%				
			Predikat Kinerja			Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100	1,175,870,000	20.25%	174,087,298	30.38%	379,591,548	29.11%	256,995,462	20.25%	330,006,470	100.00%	1,140,680,778	100.00%	2,782,950,323	100.00%	67.47
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	757,850,000	3	157,437,298	3	149,895,048	3	239,295,462	4	178,418,695	13	725,046,503	69	1,852,688,068	106.15	61.76
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64	91,750,000	13	16,650,000	20	19,195,100	20	17,700,000	11	38,173,899	64	91,718,999	103	194,857,979	32.19	51.96
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	326,270,000	-	-	1	210,501,400	-	-	1	113,413,876	2	323,915,276	4	735,404,276	80.00	98.05
			Rata-Rata Capaian Kinerja			20.25%	14.80%	30.38%	32.28%	29.11%	21.86%	20.25%	15.66%	100.00%	97.01%				
			Predikat Kinerja			Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	100	1,306,769,000	0.20%	429,743,873	99.21%	159,558,400	0.20%	178,363,238	0.40%	476,240,047	0.40%	1,243,905,558	0.40%	3,825,138,878	0%	39.43
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Tepat Waktu	100	1,061,208,100	0.20%	429,743,873	99.21%	139,283,900	0.20%	74,746,238	0.40%	368,882,647	100.00%	1,012,656,658	100.00%	2,740,708,758	100.00%	38.07
		Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD / RKPJMD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2	159,411,300	-	-	-	-	1	24,000,000	1	135,321,300	2	159,321,300	4	731,996,300	80.00	292.80
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2	128,267,900	1	34,509,373	1,750,000	-	-	32,571,238	1	44,449,347	2	113,279,958	4	241,321,558	80.00	48.26
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	70,081,000	1	17,385,000	-	-	-	-	1	48,206,000	2	65,591,000	4	108,906,000	80.00	31.12



No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		
				K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%		
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	6.67	0.00			
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	1	298,139,900	182,564,500	1	105,554,900	-	0	-	1	288,119,400	5	691,171,400	100.00	25.60			
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1,000	227,422,000	191,785,000	1,000	25,754,000	-	0	-	1,000	217,539,000	3000	608,830,000	60.00	44.28			
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD)	2	177,886,000	3,500,000	-	6,225,000	1	18,175,000	1	140,906,000	2	168,806,000	5	358,483,500	50.00	19.92		
Rata-Rata Capaian Kinerja						0.20%	40.50%	99.21%	13.13%	0.20%	7.04%	0.40%	34.65%	100.00%	95.42%					
Predikat Kinerja						Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Teriputnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	176,417,000	0.00%	-	0%	1,714,000	0.00%	79,044,000	100.00%	84,837,500	100.00%	165,595,500	100.00%	906,342,910	100.00%	72.51	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	49,454,000	-	-	1,714,000	-	25,546,500	1	20,514,500	1	47,775,000	11	348,153,160	220.00	46.42		
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1	72,903,000	-	-	-	-	1	64,323,000	1	64,323,000	401	504,692,250	72.91	100.94			
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	54,060,000	-	-	-	1	53,497,500	1	-	2	53,497,500	2	53,497,500	40.00	10.70		
Rata-Rata Capaian Kinerja						0.00%	0.00%	0.00%	0.97%	0.00%	44.81%	100.00%	48.09%	100.0%	93.87%					
Predikat Kinerja						Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	69,143,900	-	-	25.00%	18,560,500	25.00%	24,573,000.00	50.00%	22,519,900	100.00%	65,653,400	100.00%	178,087,210	100.00%	14.25	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	14,759,900	-	-	-	-	1	14,661,900	1	14,661,900	4	113,929,710	80.00	22.79			
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3	54,384,000	-	1	18,560,500	1	24,573,000	1	7,858,000	3	50,991,500	6	64,157,500	40.00	8.55		
Rata-Rata Capaian Kinerja						0.00%	0.00%	25.00%	26.84%	25.00%	35.54%	50.00%	32.57%	100.00%	32.57%					



No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%	
				Predikat Kinerja		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Rendah				
				Rata-Rata Capaian Kinerja		0.07%	13.50%	41.40%	13.65%	8.40%	29.13%	50%	38.44%	100.00%	73.95%				
				Predikat Kinerja		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi				
3	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			2,343,017,900		415,023,927		523,243,211		546,624,216.00		739,045,594.00		2,223,936,948				
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	788,977,100	50.00%	56,307,000	0.00%	249,820,651	28.89%	243,601,353	21.11%	201,016,054	100.00%	750,745,058	100.00	2,919,712,179	381.10	23.59
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14	199,436,800	14	9,598,000	-	94,965,000	0	73,290,000	0	12,900,000	14	190,753,000	40	363,504,040	58.82	20.08
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	13	1,974,800	-	-	-	-	13	1,973,000	0	-	13	1,973,000	39	6,373,000	60.00	10.99
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13	54,635,900	13	18,955,000	-	6,970,000	0	15,530,000	0	12,671,000	13	54,126,000	39	77,554,064	60.00	21.85
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	13	62,920,500	-	-	-	-	13	60,165,000	0	-	13	60,165,000	39	77,015,000	60.00	5.64
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	213,051,500	9	13,255,000	-	51,510,000	-	82,984,500	1	59,827,500	10	207,577,000	28	676,891,030	62.22	50.03
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	27	7,200,000	60.00	12.41
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9	51,616,800	-	10,799,000	-	6,327,651	0	9,658,853	9	24,435,554	9	51,221,058	27	52,301,058	60.00	14.94



Rencana Kerja Bappedalibangda Tahun 2025

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
						I		II		III		IV				13=6+12		14=13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1				9	205,340,800	-	3,700,000	-	90,048,000	0	-	9	91,182,000	9	184,930,000	27	291,080,000	60.00	13.80
Rata-Rata Capaian Kinerja						50.00%	7.14%	0.00%	31.66%	28.89%	30.88%	21.11%	25.48%	100.00%	95.15%				
Predikat Kinerja						Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	785,774,600	29.41%	248,418,667	14.71%	104,494,000	17.65%	20,902,866	38.24%	380,727,900	100.00%	754,543,433	100.00	2,295,088,460	369.69	34.10
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	5	19,284,200	5	19,224,200	-	0	-	-	-	5	19,224,200	13	164,595,960	56.52	15.31	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	44,000,000	-	-	1	7,100,000	1	6,210,000	2	30,452,500	4	43,762,500	12	132,312,500	60.00	37.80
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	92,815,000	2	16,740,000	-	5,075,000	1	2,385,000	1	64,695,000	4	88,895,000	12	223,720,000	60.00	37.29
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPMD pada Bidang Perekonomian	4	166,402,000	-	66,084,467	-	0	-	4,824,866	4	81,739,000	4	152,648,333	12	573,988,333	60.00	43.32
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	5	206,486,400	1	71,789,000	2	83,654,000	0	-	2	47,643,400	5	203,086,400	13	398,905,350	56.52	36.10
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	30,000,000	-	-	1	5,550,000	2	4,500,000	1	19,770,000	4	29,820,000	12	88,110,000	60.00	25.17
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	50,000,000	1	18,175,000	1	3,115,000	1	900,000	1	27,545,000	4	49,735,000	12	136,340,000	60.00	22.72



No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5*100%								
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4	176,787,000	1	56,406,000	-	1	2,083,000	2	108,883,000	4	167,372,000	12	577,116,317	60.00	43.56	
		Rata-Rata Capaian Kinerja		29.41%	31.61%	14.71%	13.30%	18%	2.66%	38.24%	48.45%	100.00%	96.03%						
		Predikat Kinerja		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100	768,266,200	11.43%	110,298,260	8.57%	168,928,560	54.76%	282,119,997	25.24%	157,301,640	100.00%	718,648,457	100.00	1,863,896,491	366.03	25.71
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	65,100,000	1	4,515,000	1	5,932,500	1	42,417,500	1	2,257,500	4	55,122,500	10	150,708,000	55.56	20.09
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	15,000,000	-	1	2,235,000	1	4,170,000	1	8,440,000	3	14,845,000	9	32,564,600	60.00	13.03	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	50,127,000	1	6,390,000	-	4,610,000	1	20,705,000	1	16,004,000	3	47,709,000	9	168,213,014	60.00	16.82
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	216,889,400	-	24,661,260	1	36,331,260	1	75,554,480	1	67,771,640	3	204,318,640	9	614,334,240	60.00	40.96
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50	206,500,000	20	52,470,000	9	82,550,000	13	45,952,500	8	6,892,500	50	187,865,000	148	309,125,000	59.68	41.22
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	49	15,000,000	-	4	4,185,000	26	5,805,000	19	4,920,000	49	14,910,000	147	35,351,500	60.00	14.14	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	49	127,165,000	2	22,262,000	1	23,090,000	35	41,925,517	11	41,191,000	49	128,468,517	147	226,568,517	60.00	18.13
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah	49	72,484,800	-	1	9,994,800	37	45,590,000	11	9,825,000	49	65,409,800	147	327,031,620	60.00	21.80	



No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)				
				K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%				
		Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																				
				Rata-Rata Capaian Kinerja		11.43%	14.36%	8.57%	21.99%	54.76%	36.72%	25.24%	20.47%	100.00%	93.54%							
				Predikat Kinerja		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
4	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Penelitian dan Pengembangan																				
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan / diimplementasikan	50	745,000,000		37,931,000		170,004,850		210,009,497		314,574,841		732,520,188	100			114.29			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	136,833,500	-	0	50%	87,460,350	25%	18,297,500	25%	29,977,241	100%	135,735,091	100.00	209,220,091	1000.00	11.62			
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	136,833,500		-	50%	87,460,350	25%	18,297,500	25%	29,977,241	1	135,735,091	1	135,735,091	100.00	54.29			
				Rata-Rata Capaian Kinerja		0.00%	0.00%	0.50%	63.92%	75.51%	13.37%	25.00%	21.91%	100.00%	99.20%							
				Predikat Kinerja		Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	50,000,000	0%	-	0%	-	100%	49,550,000	0%	-	100%	49,550,000	100.00	104,649,000	1428.57	7.47	
				Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	50,000,000				1	49,550,000		-	1	49,550,000	1	49,550,000	100.00	24.78		
								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	99.10%	0.00%	0.00%	100.00%	99.10%					
				Predikat Kinerja		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	174,459,000	0%	-	50.00%	59,440,500	0.00%	9,086,997	50.00%	102,515,800	100.00%	171,043,297					
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	114,459,000		-		-	0	9,086,997	1	102,515,800	1	111,602,797	3	328,078,047	60.00	50.47	
				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1	60,000,000		-	1	59,440,500				1	59,440,500	1	59,440,500	25.00	14.86		
						Rata-Rata Capaian Kinerja		0.00%	0.00%	50.00%	34.07%	0.00%	5.21%	50.00%	58.76%	100.00%	98.04%					
		Predikat Kinerja		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	383,707,500	18%	37,931,000	25.00%	23,104,000	8%	133,075,000	50.00%	182,081,800	100%	376,191,800							



Rencana Kerja Bappeditbangda Tahun 2025

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
						I		II		III		IV							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100%	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	170,396,000	0.35	24,409,000	0.5	17,694,000	0.15	127,600,000		-	1	169,703,000	2	629,117,560	40.00	62.91
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	213,311,500		13,522,000		5,410,000	0	5,475,000	1	182,081,800	1	206,488,800	1	206,488,800	33.33	34.41
			Rata-Rata Capaian Kinerja			17.50%	14.32%	25.00%	6.02%	7.50%	34.68%	50.00%	47.45%	100.00%	98.04%				
			Predikat Kinerja			Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				



Penjelasan dari tabel tersebut adalah sebagai berikut :

- Kolom 4 merupakan kondisi target kinerja capaian pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
- Kolom 5 merupakan kondisi target kinerja program kegiatan dari tahun 2016-2020;
- Kolom 10 merupakan perkiraan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan (tahun 2023), merupakan tahun awal Renstra Bappelitbangda dan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga Kabupaten Sukabumi mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kegiatan dan sub kegiatan yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pencapaian hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah membantu kerja bidang-bidang di Bappelitbangda dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program kegiatan Perangkat Daerah yang dibawahinya. Namun disisi lain juga terdapat faktor penghambat yaitu adanya keterbatasan jumlah pegawai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda

Sesuai Peraturan Bupati Sukabumi nomor 92 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, adapun



tupoksinya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Sukabumi maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

- 1) Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang selaras, terpadu dan terukur;
- 2) Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 3) Memfasilitasi keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
- 4) Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, selaras, koordinasi dan transparansi;
- 5) Memberikan informasi dan data potensi pembangunan;
- 6) Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Upaya Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, akademisi serta sektor swasta;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan penyelenggaraan sistem perencanaan partisipatif;
- 3) Terselenggaranya Forum Gabungan Perangkat Daerah



- 4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan sendiri tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi meliputi kapasitas SDM aparatur, sarana prasarana yang memadai serta sistem perencanaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, meliputi :

- 1) Peningkatan kapasitas aparatur perencana melalui pendidikan dan pelatihan formal;
- 2) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- 3) Meningkatnya perencanaan internal yang selaras, sinergi dan terpadu
- 4) Serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada dokumen Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi sebagai berikut;



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani (T4)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel (SS17)	Nilai akuntabilitas kinerja daerah (poin)	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00
		Meningkatnya inovasi daerah (SS18)	Indeks inovasi daerah (poin)	57,50	58,50	59,00	59,50	60,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dijabarkan bahwa Nilai akuntabilitas kinerja daerah merupakan akumulasi dari komponen yang dinilai serta indeks inovasi daerah Indikator Kinerja RPJMD yang diturunkan menjadi Indikator Kinerja Renstra Bappelitbangda, dimana Nilai akuntabilitas kinerja daerah terdiri dari 5 komponen dan bobot penilaian sehingga indikator kinerja Bappelitbangda berkonsentrasi pada komponen perencanaan kinerja, untuk lebih jelas dapat terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.4
Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah

Komponen	Bobot	Kondisi Kinerja Awal		Target					Kondisi Kinerja Akhir
		2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
Nilai	100	64,48	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	76,00
Perencanaan Kinerja	30	21,74	22,00	22,50	23,00	23,50	24,00	25,00	25,00
Pengukuran Kinerja	25	16,41	16,60	16,80	17,20	17,40	17,80	18,20	18,20
Pelaporan Kinerja	15	10,40	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	13,50
Evaluasi Kinerja	10	6,07	6,40	6,70	7,00	7,35	7,70	8,00	8,00
Pencapaian Sasaran	20	9,86	10,00	10,50	10,80	11,25	11,50	11,30	11,30

Dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda sebagai sasaran rencana strategis, seperti yang tergambar pada tabel berikut:



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi
Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	22,00	22,50	23,00	23,50	24,00	25,00
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	n.a	50	62,5	62,5	75	87,5

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbang tahun 2021-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Bappelitbangda setiap tahunnya dalam periode 5 tahun. Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Bappelitbang tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bappelitbangda

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	n.a	25,04	25,28	25,52	25,76	26,00	26,24
			Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	n.a	25,85	26,09	26,33	26,57	26,81	27,05
			Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	n.a	26,12	26,36	26,60	26,84	27,08	27,32
		Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	n.a	50,00 %	62,5 %	62,5 %	75,00 %	75,00 %	87,5 %
		Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian, serta perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pelayanan Perkantoran							
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, berarti Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan target RPJMD Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappelitbangda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappelitbangda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappelitbangda memberikan



pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappelitbangda didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Sebagai upaya mendorong Bappelitbangda menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal.
2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan propinsi.
3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan *stake holder* lainnya terhadap perencanaan pembangunan.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain:

1. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik.
2. Ketidakselarasan peraturan tentang sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan keuangan.
3. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran.

Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan urusan penunjang urusan pemerintahan diantaranya :



1. Belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan di daerah;
2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan pusat dan daerah;
3. Tingkat partisipasi Stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan belum optimal
4. Terbatasnya ketersediaan data secara terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
5. Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi perencana;
6. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Daerah;
7. Belum tersedianya fungsional peneliti;

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Belum updatenya data makro berdampak pada pencapaian SPM dan SDGs dimana data yang aktual menjadi bukti pencapaian program nasional tersebut.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappelitbangda di masa yang akan datang peluang dan tantangan, untuk meningkatkan kinerja Bappelitbangda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :

1. Penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Tawaran Diklat dari Bappenas ataupun lembaga lainnya
3. Program prioritas nasional dan provinsi Jawa Barat yang berada di Kabupaten Sukabumi



4. Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
5. Perubahan kebijakan perencanaan
6. Masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 adalah :

1. Perbaiki metode analisis data dalam rangka proses perencanaan dengan melibatkan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi
2. Peningkatan dukungan SDM dengan melibatkan tenaga *Out Sourcing*
3. Mengoptimalkan fungsi Fungsional perencana dalam mendukung peningkatan kinerja perencanaan
4. Mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada kebijakan *money follow program*
5. Mewujudkan perencanaan strategis berbasis penelitian

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Rencana Kerja Bappelitbangda terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten sukabumi dapat dijelaskan pada table berikut:



Tabel 2.7. Review Rencana Kerja Terhadap Rancangan Awal RKPD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting	
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
								Tolok Ukur	Target 2025			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						24.090.000.000,00					24.090.000.000,00	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						24.090.000.000,00					24.090.000.000,00	
PERENCANAAN						22.090.000.000,00					22.090.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	13.600.000.000,00		-	-		13.600.000.000,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	145 Dokumen	99 Dokumen	34 Dokumen	34 Dokumen	300.000.000,00		-	34 Dokumen		300.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		150.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		20.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		20.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		20.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		20.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		20.000.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 Laporan	60 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		50.000.000,00	



Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								Tolok Ukur	Target 2025		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	9.435.000.000,00	-	-	-	9.435.000.000,00	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2640 Orang	1.584 Orang	528 Orang	528 Orang/bulan	9.200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	528 Orang/bulan	9.200.000.000,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan											
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155 Dokumen	93 Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31 Dokumen	50.000.000,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	60.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90 Laporan	54 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	50.000.000,00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	70.000.000,00	-	-	-	70.000.000,00	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	70.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	325.000.000,00	-	-	-	325.000.000,00	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit	3 Unit	1 Unit	2 Unit	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	150.000.000,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											



Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								Tolok Ukur	Target 2025		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	75.000.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	15 Orang	5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	100.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.155.000.000,00		-	-	1.155.000.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi											
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	12 Paket	4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 Paket	21 Paket	7 Paket	7 Paket	25.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	25.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	15 Paket	5 Paket	5 Paket	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	300.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	6 Paket	2 Paket	2 Paket	125.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	125.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	250 Dokumen	150 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	100.000.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu											
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 Laporan	60 Laporan	20 Laporan	24 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	200.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											



Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								Tolok Ukur	Target 2025		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	400.000.000,00		-	-	400.000.000,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 unit	-	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	101 Unit	60 Unit	20 Unit	20 Unit	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	200.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.000.000.000,00		-	-	1.000.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	750.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	750.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	915.000.000,00		-	-	915.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	140 Unit	69 Unit	13 Unit	13 Unit	640.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	640.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320 Unit	60 Unit	28 Unit	64 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	75.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	100 %			100 %	3.125.000.000,00		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	3.125.000.000,00	



Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								Tolok Ukur	Target 2025		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang dibuat	-			2 Dokumen 2 Dokumen	1.925.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang dibuat	2 Dokumen 2 Dokumen	1.925.000.000,00	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah											
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	50.000.000,00	
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya											
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	
Pelaksanaan Konsultasi Publik											
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5 Berita Acara	3 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	100.000.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah											
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	13 Berita Acara	9 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	100.000.000,00	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota											
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	4 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	600.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	600.000.000,00	
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan											
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	5.000 Usulan	3.000 Usulan	1.000 Usulan	1000 Usulan	275.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1000 Usulan	275.000.000,00	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	700.000.000,00	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-			2 Dokumen	350.000.000,00		Jumlah Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	350.000.000,00	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah											



Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								Tolok Ukur	Target 2025		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	150.000.000,00	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah											
	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	550 Orang	300 Orang	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	100.000.000,00	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	100.000.000,00	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang dibuat	-			3 Dokumen 3 Dokumen	350.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang dibuat	3 Dokumen 3 Dokumen	350.000.000,00	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota											
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	100.000.000,00	
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah											
	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	5 Kerja Sama	-	1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	100.000.000,00	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah											
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	15 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	150.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	150.000.000,00	
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	500.000.000,00		-	-	500.000.000,00	
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah											
	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	100.000.000,00	
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah											
	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	



Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								Tolok Ukur	Target 2025		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota											
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,00 Nilai			26,00 Nilai	5.365.000.000,00		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,00 Nilai	5.365.000.000,00	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-			88 Dokumen	1.865.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	88 Dokumen	1.865.000.000,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	68 Dokumen	39 Dokumen	13 Dokumen	14 Dokumen	550.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	14 Dokumen	550.000.000,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	65 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	12.600.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	12.600.000,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan											
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	65 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	90.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	90.000.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan											
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	65 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	285.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	13 Laporan	285.000.000,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	48 Dokumen	27 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	400.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	9 Dokumen	400.000.000,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											



Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								Tolok Ukur	Target 2025		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	45 Laporan	27 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	12.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	12.400.000,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	45 Laporan	27 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	75.000.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	45 Laporan	27 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	440.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	440.000.000,00	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-			16 Dokumen	1.750.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	16 Dokumen	1.750.000.000,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23 Dokumen	12 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	400.000.000,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	75.000.000,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian											
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	125.000.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian											
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	275.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	275.000.000,00	



Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Hasil Analisa Kebutuhan			Catatan Penting
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								Tolok Ukur	Target 2025		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	23 Dokumen	12 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	4 Dokumen	400.000.000,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	75.000.000,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA											
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	125.000.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA											
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA				4 Laporan	275.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	275.000.000,00	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	-			52 Dokumen	1.750.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	52 Dokumen	1.750.000.000,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	18 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	3 Dokumen	300.000.000,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	50.000.000,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur											
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	15 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	200.000.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur											



Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								Tolok Ukur	Target 2025		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	15 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	300.000.000,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	248 Dokumen	147 Dokumen	49 Dokumen	49 Dokumen	300.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49 Dokumen	300.000.000,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	245 Laporan	147 Laporan	49 Laporan	49 Laporan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	49 Laporan	50.000.000,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan											
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	245 Laporan	147 Laporan	49 Laporan	49 Laporan	250.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	49 Laporan	250.000.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan											
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	245 Laporan	147 Laporan	49 Laporan	49 Laporan	300.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	49 Laporan	300.000.000,00	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						2.000.000.000,00				2.000.000.000,00	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/diimplementasikan	75 %			75 %	2.000.000.000,00		Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/diimplementasikan	75 %	2.000.000.000,00	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-			2 Dokumen	400.000.000,00		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Dokumen	400.000.000,00	
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan											
	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	200.000.000,00	
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan											



Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								Tolok Ukur	Target 2025		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	-	-	1 Rekomendasi	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	200.000.000,00	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-			1 Dokumen	200.000.000,00		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	200.000.000,00	
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan											
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	200.000.000,00	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	-	-	5 Dokumen	800.000.000,00		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5 Dokumen	800.000.000,00	
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan											
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	200.000.000,00	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan											
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	200.000.000,00	
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan											
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	200.000.000,00	
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup											
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	100.000.000,00	
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan											
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	100.000.000,00	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	-	-	3 Dokumen	600.000.000,00		Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3 Dokumen	600.000.000,00	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi											
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	200.000.000,00	
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi											



Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
					Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
								Tolok Ukur	Target 2025		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Dokumen	-	-	1 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	200.000.000,00	
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual											
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Dokumen	-	-	0 Laporan	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0 Laporan	200.000.000,00	
J U M L A H						24.090.000.000,00				24.090.000.000,00	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan langsung kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi tetapi kepada perangkat daerah teknis terkait. Usulan yang disampaikan kepada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Hal ini berdasar pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bappelitbangda merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Walaupun tupoksi Bappelitbangda tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, namun berupaya mensinergikan perencanaan partisipatif dengan pendekatan teknokratis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga usulan kegiatan masyarakat dapat terakomodasi di Perangkat Daerah terkait.



Rancangan rencana kerja Bappelitbangda di diskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan perumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di tingkat kecamatan.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan
Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Sukabumi

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL



BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”. Tema pembangunan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Berpenghasilan Menengah-Tinggi

- Transformasi struktural berjalan
- Produktivitas tenaga kerja meningkatIklim investasi kondusif
- GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055

Sejahtera

- Kualitas hidup meningkat
- Perilaku disiplin dan beradab
- SDM berkualitas dan berdaya saing
- Indeks kebahagiaan meningkat

Adil

- Ketimpangan menurun
- Redistribusi berjalan baik

Berkesinambungan

- Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (*Low Carbon Development*)



- Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKP Tahun 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi window opportunity bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tema RKP pada 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat



menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan Non-State Actor untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Sementara itu, tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Pada RPD Tahun 2024-2026 Provinsi Jawa Barat, menetapkan tema pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 yaitu “Peningkatan Perekonomian dengan mengoptimalkan SDM dan Infrastruktur yang berdaya saing”. Tema pembangunan 2024 sampai 2026 menekankan keberlanjutan pembangunan dari periode sebelumnya dengan mengoptimalkan peningkatan daya saing SDM, pembangunan ekonomi berkualitas, pemerataan pengembangan wilayah yang didukung infrastruktur andal secara berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan penrepaan inovasi ddaerah dalam pembangunan.

Tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam perumusan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan



daerah 3 (tiga) tahun kedepan, pembangunan Jawa Barat diprioritaskan pada:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia..
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan yang Mengoptimalkan Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Serta Dan Kelautan Dan Perikanan.
3. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran secara terpadu.
4. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan.
5. Penerapan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Berdasarkan arah kebijakan Kabupaten Sukabumi serta untuk mendukung tema pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, maka tema pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2025 yaitu “Pemantapan Infrastruktur Daerah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 meliputi:

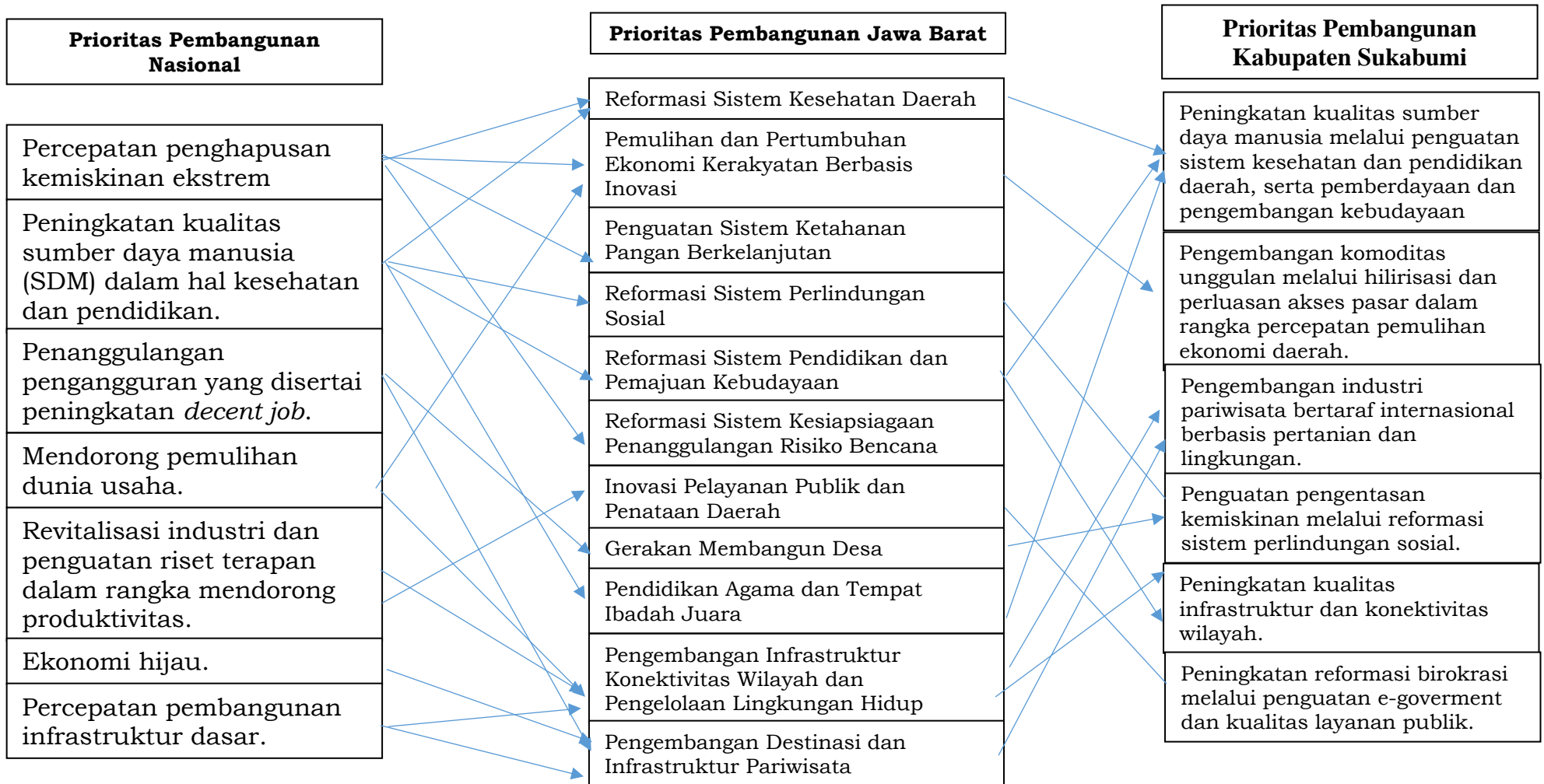
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan.
2. Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.
3. Pengembangan industri pariwisata bertaraf internasional berbasis pertanian dan lingkungan.



4. Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial.
5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah.
6. Peningkatan reformasi birokrasi melalui penguatan e-government dan kualitas layanan publik.

Prioritas pembangunan daerah di atas dirumuskan dari janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan isu strategis, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan proyek prioritas daerah, serta dukungannya terhadap upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).

Adapun sinergitas prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi dengan prioritas pembangunan Jawa Barat dan prioritas nasional pada tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Sukabumi tahun 2025



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda

Penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 yang arah kebijakannya nanti akan dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Selain itu Rencana Strategis Bappelitbangda yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja juga akan disusun untuk jangka waktu 2021-2026. Sehubungan hal tersebut, maka penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu pada kaidah transisi RPJMD 2016-2021, Rancangan Renstra Bappelitbangda 2021-2026, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 dan didasarkan pada Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Lima Tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025.

Arah kebijakan makro selanjutnya dirumuskan menjadi sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai ini, selanjutnya dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran perangkat daerah, sehingga terwujud keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antar waktu dan antar lembaga. Dalam kaitannya dengan penetapan prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan tema pembangunan tahun 2025, maka kedudukan Bappelitbangda adalah mendukung secara langsung dalam misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 yang keempat yaitu



Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.

Renja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi semua bidang dan sekretariat di Bappelitbangda dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, renja ini dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri dalam meningkatkan kinerja lembaga Bappelitbangda.

Tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 dengan memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, serta isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi.

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi, dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, sehingga Bappelitbangda sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien.



3.2.1. Tujuan

Tujuan Bappelitbangda mendukung Visi Misi Kepala Daerah yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Profesional, dan Akuntabel”.

3.2.2. Sasaran Jangka menengah

Sasarana yang hendak dicapai adalah :

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
2. Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Dan dituangkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	22,20	22,20	22,50	22,95	23,50	24,00	24,50	
	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ diimplementasikan	n.a	50%	50%	62,5%	62,5%	75%	87,5%	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel		Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	-	65	68	70	73	75	80
			Indeks profesionalisme ASN	-	40	42	45	47	48	50
			Persentase pertumbuhan layanan publik berbasis e-gov	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Predikat nilai akuntabilitas kinerja daerah	B	BB	BB	BB	A	A	A		



3.3 Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2025

Program dan kegiatan Renja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yakni terwujudnya Kabupaten Sukabumi Religius, Maju, dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin serta pencapaian prioritas juga sasaran daerah, dengan tema Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 Yaitu **“Pemantapan Infrastruktur daerah untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat”**;
2. Sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terintegrasi ke dalam dokumen Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi.

Dalam kaitannya dengan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, pada tahun 2025 Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi merencanakan akan mencapainya dengan melaksanakan 4 program yang terdiri dari 19 kegiatan dan 87 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 24.090.000.000,- (Duapuluh Empat milyar Sembilan Puluh Juta Rrupiah) dengan lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Sukabumi kecuali untuk kegiatan rapat koordinasi dan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di luar daerah. Dari total pagu indikatif tersebut, seluruhnya bersumber dari dana alokasi umum (DAU) Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan Renja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 akan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.

Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
 - 1.1.2. *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
 - 1.1.3. *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
 - 1.1.4. *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*
 - 1.1.5. *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*
 - 1.1.6. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
 - 1.1.7. *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
 - 1.2.2. *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD*
 - 1.2.3. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
 - 1.2.4. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*
 - 1.2.5. *Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*
- 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1. *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. *Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*
 - 1.4.2. *Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*
 - 1.4.3. *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*



- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1. *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
 - 1.5.2. *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
 - 1.5.3. *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
 - 1.5.4. *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*
 - 1.5.5. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*
 - 1.5.6. *Fasilitasi Kunjungan Tamu*
 - 1.5.7. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
 - 1.5.8. *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*
 - 1.5.9. *Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
 - 1.7.2. *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8.1. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - 1.8.2. *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - 1.8.3. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 2.1.1. *Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah*
 - 2.1.2. *Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya*
 - 2.1.3. *Pelaksanaan Konsultasi Publik*
 - 2.1.4. *Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD*
 - 2.1.5. *Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota*
 - 2.1.6. *Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan*
 - 2.1.7. *Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota*



- 2.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.2.1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.2.2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
 - 2.2.3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - 2.3.2. Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
 - 2.3.3. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - 2.4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - 2.4.1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - 2.4.2. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - 2.4.3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- 3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
- 3.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 3.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 3.1.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 3.1.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 3.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan



- 3.1.5. *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*
- 3.1.6. *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*
- 3.1.7. *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*
- 3.1.8. *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia*
- 3.2. *Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*
 - 3.2.1. *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*
 - 3.2.2. *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*
 - 3.2.3. *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*
 - 3.2.4. *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian*
 - 3.2.5. *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*
 - 3.2.6. *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*
 - 3.2.7. *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*
 - 3.2.8. *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA*
- 3.3. *Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*
 - 3.3.1. *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*
 - 3.3.2. *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*



- 3.3.3. *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*
- 3.3.4. *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur*
- 3.3.5. *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*
- 3.3.6. *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*
- 3.3.7. *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*
- 3.3.8. *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan*

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- 4.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 4.1.1. *Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan*
- 4.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - 4.2.1. *Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan*
 - 4.2.2. *Penelitian dan Pengembangan Pariwisata*
 - 4.2.3. *Penelitian dan Pengembangan Kesehata*
- 4.3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 4.3.1. *Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
 - 4.3.2. *Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan*
 - 4.3.3. *Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan*
 - 4.3.4. *Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan*
 - 4.3.5. *Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum*
 - 4.3.6. *Penelitian dan Pengembangan Perhubungan*
 - 4.3.7. *Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan*
 - 4.3.8. *Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*
- 4.4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi



- 4.4.1. *Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi*
- 4.4.2. *Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi*
- 4.4.3. *Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif*
- 4.4.4. *Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*
- 4.4.5. *Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektua*

Seluruh program dan kegiatan pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi yang bersumber dari Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU).



Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 terdapat 4 (empat) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 92 (Sembilan puluh dua) sub kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi



dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program dan kegiatan pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Berikut program dan kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.



Table 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab Sukabumi Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							24,090,000,000
	PERENCANAAN							22,090,000,000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan				13,600,000,000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan			32	300,000,000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	100%	9	150,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	100%	1	20,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	100%	1	20,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	100%	1	20,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Laporan	100%	1	20,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	100%	3	20,000,000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	100%	16	50,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan			580	9,435,000,000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	100%	528	9,200,000,000
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100%	31	50,000,000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	100%	1	50,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	100%	1	60,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	100%	18	50,000,000
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	100%	1	25,000,000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Adminstrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan				70,000,000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	100%	1	70,000,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi			10	325,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	100%	2	150,000,000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	100%	3	75,000,000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100%	5	100,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran yang dipenuhi			94	1,155,000,000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100%	4	25,000,000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100%	7	25,000,000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100%	5	300,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100%	2	125,000,000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	100%	50	100,000,000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	100%	12	200,000,000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100%	12	300,000,000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100%	1	30,000,000
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	100%	1	50,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah			21	400,000,000
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	100%	1	200,000,000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100%	20	200,000,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa langganan kebutuhan perkantoran yang dipenuhi			15	1,000,000,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100%	12	250,000,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100%	3	750,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			78	915,000,000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	100%	13	640,000,000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100%	64	75,000,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	100%	1	200,000,000
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu				3,125,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang dibuat			1007	1,925,000,000
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	100%	1	50,000,000
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	100%	1	100,000,000
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	100%	1	100,000,000
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	100%	1	100,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	100%	1	600,000,000
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	100%	1000	275,000,000
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	100%	2	700,000,000
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Laporan analisis data dan Informasi			102	350,000,000
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	100%	1	150,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	100%	100	100,000,000
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	100%	1	100,000,000
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan yang dibuat			3	350,000,000
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	100%	1	100,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	100%	1	100,000,000
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	100%	1	150,000,000
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			3	500,000,000
			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Data	100%	1	100,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	100%	1	100,000,000
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	100%	1	300,000,000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD				5,365,000,000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	100%	22	1,865,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	100%	14	550,000,000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	100%	13	12,600,000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	100%	13	90,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	100%	13	285,000,000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	100%	10	400,000,000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	100%	9	12,400,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	100%	9	75,000,000
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	100%	9	440,000,000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Dokumen	100%	8	1,750,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	100%	5	400,000,000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	100%	4	75,000,000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	100%	4	125,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	100%	4	275,000,000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	100%	5	400,000,000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	100%	4	75,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	100%	4	125,000,000
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang SDA	Laporan	100%	4	275,000,000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA			52	1,750,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	100%	4	300,000,000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	100%	3	50,000,000
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	100%	3	200,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	100%	3	300,000,000
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	100%	49	300,000,000
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	100%	49	50,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	100%	49	250,000,000
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	100%	49	300,000,000
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							2,000,000,000
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan / diimplementasikan				2,000,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			2	400,000,000
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peratura	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	100%	1	200,000,000
			Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	100%	1	200,000,000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			1	200,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	100%	1	200,000,000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					5	800,000,000
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	100%	1	200,000,000
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	100%	1	200,000,000
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	100%	1	200,000,000
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	100%	1	100,000,000



NO	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Keluaran Program/Kegiatan/sub. Kegiatan	Keluaran	Target Capaian	Target Volume Keluaran	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	100%	1	100,000,000
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			3	600,000,000
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	100%	1	200,000,000
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknolog	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	100%	1	200,000,000
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	100%	1	200,000,000
							JUMLAH	24,090,000,000



Bab V. PENUTUP

Dokumen Renja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Renja Tahun 2025 ini sebagai pedoman/acuan bagi Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025. Untuk itu terkait dengan kaidah pelaksanaan, Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi sebagai *leading sector* yang diberikan kewenangan merencanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan Standar Operasional Prosedur untuk menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut dari dokumen Renja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi yang prospektif, realistis, dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin.



Substansi Renja Bappelitbangda disusun dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinatif, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Renja ini.
2. Pelaksanaan semua kegiatan, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Revisi atau penyesuaian dokumen ini dapat dilakukan bila ada perubahan perundangan, perubahan kebijakan dan perubahan signifikan target kinerja yang harus dicapai.
4. Pendanaan program dan kegiatan pada Rencana Kerja ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kami berharap, bahwa Renja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga



seluruh target indikator kinerja tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Palabuhanratu, Juli 2024
Kepala,

Aep Majmudin, SE., MM.
Pembina, IV/a
NIP. 19740805 200312 1 003



Lampiran – Lampiran

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

LAMPIRAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) NON BLUD					PROG/KEG/SUBKEG PAD	DBH PUSAT	DAU - UMUM		DAU - SG PENDIDIKAN, KESEHATAN, PU, KELURAHAN, PPPK	TOTAL RANCANGAN KUA-PPAS 2025
		JASA NON ASN	HONOR DA'I	HARI JADI	RUTIN KANTOR	TPP SKPD			GAJI & TUNJANGAN	PROG/KEG/SUBKEG DAU		
1	2	4	5	6	7	9	11	13	14	15	25	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	632,102,000	19,200,000	50,000,000	3,204,667,429	4,727,070,467	5,214,528,100	3,067,762,021	-	1,221,292,332	18,136,622,349	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	632,102,000	19,200,000	50,000,000	3,204,667,429	-	5,214,528,100	3,067,762,021	-	234,684,332	12,422,943,882	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	300,000,000	-	-	-	-	-	300,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	-	150,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	235,000,000	-	5,214,528,100	3,067,762,021	-	234,684,332	8,751,974,453	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	5,214,528,100	3,067,762,021	-	234,684,332	8,516,974,453	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	60,000,000	-	-	-	-	-	60,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	-	25,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	70,000,000	-	-	-	-	-	70,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	70,000,000	-	-	-	-	-	70,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	188,666,500	-	-	-	-	-	188,666,500	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	13,666,500	-	-	-	-	-	13,666,500	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	-	75,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	50,000,000	964,163,825	-	-	-	-	-	1,014,163,825	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	-	25,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	-	25,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	50,000,000	253,225,300	-	-	-	-	-	303,225,300	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	122,564,700	-	-	-	-	-	122,564,700	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	168,517,500	-	-	-	-	-	168,517,500	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	202,336,325	-	-	-	-	-	202,336,325	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	25,950,000	-	-	-	-	-	25,950,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	41,570,000	-	-	-	-	-	41,570,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	294,019,000	-	-	-	-	-	294,019,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	120,000,000	-	-	-	-	-	120,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	174,019,000	-	-	-	-	-	174,019,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632,102,000	19,200,000	-	218,670,442	-	-	-	-	-	869,972,442	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	218,670,442	-	-	-	-	-	218,670,442	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	632,102,000	19,200,000	-	-	-	-	-	-	-	651,302,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	934,147,662	-	-	-	-	-	934,147,662	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	667,320,000	-	-	-	-	-	667,320,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	66,827,662	-	-	-	-	-	66,827,662	
5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	-	200,000,000	
5.01.5.05.0.00.01.0000.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	1,717,292,800	-	-	-	-	1,717,292,800	
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	-	-	1,117,292,800	-	-	-	-	1,117,292,800	

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) NON BLUD					DBH PUSAT	DAU - UMUM		DAU - SG	TOTAL RANCANGAN KUA-PPAS 2025
		JASA NON ASN	HONOR DA'I	HARI JADI	RUTIN KANTOR	PROG/KEG/SUBKEG PAD	TPP SKPD	GAJI & TUNJANGAN	PROG/KEG/SUBKEG DAU	PENDIDIKAN, KESEHATAN, PU, KELURAHAN, PPPK	
1	2	4	5	6	7	9	11	13	14	15	25
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	-	-	-	-	494,332,600	-	-	-	-	494,332,600
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	254,154,200	-	-	-	-	254,154,200
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	168,806,000	-	-	-	-	168,806,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	175,000,000	-	-	-	-	175,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	175,000,000	-	-	-	-	175,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	-	-	250,000,000	-	-	-	-	250,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	2,959,777,667	-	-	-	-	2,959,777,667
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	-	943,253,000	-	-	-	-	943,253,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	190,753,000	-	-	-	-	190,753,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	-	-	12,600,000	-	-	-	-	12,600,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	-	-	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	-	-	142,500,000	-	-	-	-	142,500,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-	-	-	12,400,000	-	-	-	-	12,400,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-	-	-	220,000,000	-	-	-	-	220,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	-	-	1,058,804,733	-	-	-	-	1,058,804,733
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	200,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	-	-	-	-	152,648,333	-	-	-	-	152,648,333
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	203,086,400	-	-	-	-	203,086,400

KODE	PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) NON BLUD					DBH PUSAT	DAU - UMUM		DAU - SG	TOTAL RANCANGAN KUA-PPAS 2025
		JASA NON ASN	HONOR DA'I	HARI JADI	RUTIN KANTOR	PROG/KEG/SUBKEG PAD	TPP SKPD	GAJI & TUNJANGAN	PROG/KEG/SUBKEG DAU	PENDIDIKAN, KESEHATAN, PU, KELURAHAN, PPPK	
1	2	4	5	6	7	9	11	13	14	15	25
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	-	-	-	62,500,000	-	-	-	-	62,500,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	-	-	-	-	190,570,000	-	-	-	-	190,570,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	-	957,719,934	-	-	-	-	957,719,934
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	81,179,300	-	-	-	-	81,179,300
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	-	-	176,540,634	-	-	-	-	176,540,634
5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	986,608,000	1,036,608,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	-	-	-	-	-	-	236,608,000	236,608,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	-	-	-	-	-	-	-	-	186,608,000	186,608,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000,000	400,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000	200,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	300,000,000	350,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000,000	200,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000
5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000